

EFEKTIVITAS PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI KAMPUNG WARYEI DISTRIK SUPIORI BARAT KABUPATEN SUPIORI

Sri Handayani¹⁾ dan Amiruddin²⁾

^{1,2)}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak
srihandayani@iyb.ac.id¹⁾, amir.iisipyapisbiak@gmail.com²⁾

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektifitas program alokasi dana desa di kampung Waryei, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data, dan triangulasi sumber sebagai teknik validasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ADD dikelola secara efektif dan efisien oleh Kepala Kampung. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD adalah memberikan saran-saran kepada Kepala Kampung.

Kata Kunci: Efektifitas, Alokasi Dana Desa

PENDAHULUAN

Secara empiris terlihat bahwa pemerintahan desa masih memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam melaksanakan program ADD secara efisien dan efektif. Oleh sebab itu, pengelolaan ADD memerlukan pemahaman yang mendalam dari aparatur dan masyarakat desa, tenaga pengelola yang profesional ditingkat desa, pemahaman tentang fungsi manajemen, pentingnya penjadwalan pelaksanaan ADD di tingkat desa, pemahaman dan keterampilan tentang sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan di tingkat desa, serta BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat desa difungsikan dengan baik.

Melalui pelaksanaan Alokasi Dana Desa ada harapan untuk mampu mengurangi jumlah penduduk miskin dipedesaan. Basis dari program ini adalah masyarakat desa di dalam pembangunan desa, oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Waryei Distrik Supiori Barat, dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.

Salah satu desa penerima ADD di Kabupaten Supiori adalah Kampung Waryei, Distrik Supiori. Untuk itu perlu dilakukan kajian mengenai Efektivitas Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Waryei Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori. Supaya kajian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka kajian dilakukan melalui penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu Kampung di Distrik Supiori Barat yaitu kampung Waryei. Adapun alasan pemilihan Lokus penelitian dikarenakan Kampung di Distrik Supiori Barat yaitu Kampung Waryei merupakan wilayah yang masyarakatnya perlu mendapat bantuan, sehingga dapat hidup layak seperti pada masyarakat lainnya yang berada pada kampung lain.

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi

kasus. Menurut Fathoni (2006: 99) studi kasus berarti penelitian terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung masalah atau perkara sehingga perlu ditelaah kemudian dicarikan cara penanggulangannya antara lain melalui penelitian. Kasus dalam penelitian kualitatif dapat berupa individu, program, institusi, atau kelompok (Patton, 1980: 303) dalam (Ahmadi, 2005: 35).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Adapun *Penelitian kualitatif* adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.

Dalam penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa/kondisi yang sedang diteliti. Untuk itu hasil dari penelitian ini memerlukan kedalaman analisis dari peneliti. Selain itu, hasil penelitian ini bersifat subjektif sehingga tidak dapat digeneralisasikan. penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Melalui metode ini, peneliti akan menganalisis data yang didapatkan dari lokasi penelitian secara akurat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan strategi pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi. Observasi menurut Bungin (2010: 115) adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu panca indera lainnya (telinga, penciuman, mulut, dan kulit). Wawancara dilakukan dengan cara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*), yang dalam

pelaksanaannya peneliti langsung kelokasi penelitian untuk melakukan tanya jawab kepada informan yang telah ditunjuk, baik dari kalangan pejabat maupun dari kalangan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat sendiri. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder melalui dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian sebagai sumber data, yaitu pada dokumen kantor, jurnal, dan literatur ilmiah, yang berkaitan dengan kinerja pegawai.

Pada penelitian ini menggunakan sumber data dari beberapa orang yang diamati dan di wawancarai, dengan melakukan pencacatan secara tertulis, rekaman, serta pengambilan photo/gambar. Adapun jenis data yang akan di gunakan adalah primer dan sekunder. Data primer adalah sumber data utama yang di gunakan untuk menjangring berbagai data dan informasi yang terkait dengan focus yang akan di kaji, hal ini dilakukan melalui metode wawancara. Dengan metode wawancara calon peneliti akan mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD. Data-data informasi bersumber dari yang masyarakat, Pemerintah desa, dan Tokoh masyarakat. Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang di perlukan untuk melengkapi data primer. Hal ini akan di sesuaikan dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan obyek yang di kaji. Data sekunder dapat di peroleh dari dokumen-dokumen resmi yang berupa buku-buku literatur, profil kantor, hasil-hasil kajian/penelitian, serta regulasi yang terkait dengan pelaksanaan ADD.

Narasumber atau informan dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang memberikan informasi atau data kepada

penelitian, adapun yang menjadi Narasumber atau informan adalah; Kepala Kampung, Sekretaris kampung, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Kesra, Tokoh Masyarakat dan masyarakat biasa.

Berkaitan dengan analisis data kualitatif, penulis merujuk pada pendapat Miles dan Huberman (1992) yang menegaskan bahwa proses analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan utama yang terjadi secara bersamaan yaitu; reduksi data, penyajian data, penarikan data, kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data sebagai proses pemilahan, pemusatan, penyederhanaan, pengabsaan, serta transformasi data-data kasar yang terkait dengan masalah Kinerja Staf. Kemudian penyajian data, di maknai sebagai sekumpulan informasi dan data yang terkait dengan efektivitas pelaksanaan ADD, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ADD.

Dalam penelitian ini peneliti masih diperhadapkan pada berbagai hambatan-hambatan, misalnya dalam pengumpulan data, informan yang peneliti akan temui kadang tidak berada ditempat, atau informan tersebut tidak punya waktu untuk diwawancarai. Untuk mengatasi kendala ini penulis akan menunggu dan melakukan ulang wawancara sampai informan tersebut mempunyai waktu untuk diwawancarai atau untuk memberikan informasi kepada peneliti, dengan asumsi bahwa karya ilmiah ini tidak akan rampung jika tidak didukung dengan data dari informan baik dari kalangan pemerintah maupun tokoh masyarakat dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada mulanya Kampung Waryei rumahnya berlabuh diatas permukaan laut

dan pada tahun 1991 terbentuklah Lembaga Swadaya Sosial (LSD) di Kampung Waryei dan Ketuanya adalah : Bapak. Efratius Fanindi. Kampung Waryei adalah Kampung pemekaran dari Kampung Induk Koiryakam.

Secara umum pelayanan pemerintah Kampung Waryei kepada masyarakat cukup memuaskan. Dalam beberapa sesi wawancara langsung dengan masyarakat Kampung Waryei yang dipilih secara acak, terungkap bahwa dalam memberikan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan, pertanahan dan lain-lain dikerjakan dengan cepat dan dilayani selama 24 jam, baik pelayanan pada jam kerja di kantor maupun di luar jam kerja di rumah kepala kampung, sekretaris Kampung atau perangkat kampung lainnya.

Hasil Penelitian

Untuk mengetahui efektivitas Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Waryei Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori, penulis melihatnya melalui tiga hal, yaitu: 1) peran Kepala Kampung; 2) partisipasi masyarakat; 3) masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan ADD. Di mana sasarannya pada efektifitasnya program pembangunan melalui ADD. Untuk jelaskan tentang ketiga hal tersebut di atas, berikut ini penulis menguraikan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut.

1. Peranan Kepala Kampung Waryei dalam pelaksanaan ADD.

Alokasi Dana Desa dapat termanfaat dengan baik sesuai tujuan pemerintah tergantung dari seberapa besar peranan Kepala Kampung dalam pelaksanaan ADD tersebut. Peranan Kepala Kampung terkait dengan ADD dapat dikatakan berperan apabila Kepala Kampung dapat melaksanakan

kewenangannya dengan baik. Untuk melihat bagaimana kewenangan Kepala Kampung terkait dengan ADD, penulis mewawancarai informan 1 (Kepala Kampung), yang memberi tanggapan bahwa sebagai Kepala Kampung, kewenangan yang dimiliki terkait ADD antara lain yaitu menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, dan melaksanakan pembangunan desa, dan mengorganisir setiap anggota masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan di kampung, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung maupun oleh pihak lain. Karena kewenangan yang diberikan kepada merupakan amanah, maka kewenangan ini perlu dijalankan dengan baik.

Informasi yang dikemukakan oleh informan 1 (Kepala Kampung), dipertegas oleh informan 3 (kepala Urusan pemerintahan), yang mengatakan bahwa pihaknya telah melihat Kepala Kampung Waryei sudah melaksanakan kewenangannya dengan baik, karena dengan adanya program ADD, Kepala Kampung cukup memperhatikan penggunaan dan pelaksanaan program ADD tersebut.

Lebih lanjut, terdapat informasi dari informan 1 (Kepala Kampung) tentang sasaran dan tujuan pekerjaan terkait dengan ADD, dan informan 1 (Kepala Kampung) memberi tanggapan bahwa sasaran dan tujuan pekerjaan sebagai Kepala Kampung terkait ADD yaitu agar supaya masyarakat dapat hidup lebih sejahtera melalui proyek pembangunan dengan adanya ADD

tersebut. Proyek pembangunan yang saya maksud yaitu pembangunan fisik, seperti perbaikan jalan, drainase, rehab rumah.

Selanjutnya, mengenai tanggungjawab dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kampung terkait dengan pelaksanaan ADD, informan 1 (Kepala Kampung) mengatakan bahwa pihaknya menyadari bahwa Kepala Kampung itu pemimpin di Kampung Waryei, secara otomatis saya wajib bertanggungjawab dalam bidang tugas saya, apakah tugas sebagai Kepala Kampung (sebagai perpanjangan tangan Kepala Distrik) ataukah tugas terkait dengan ADD, yang merupakan program pemerintah yang dilaksanakan di Kampung, tugas yang dilakukan yaitu menyelenggarakan roda pemerintahan di kampung, melaksanakan pembangunan dikampung, melakukan pembinaan, serta pemberdayaan kepada setiap masyarakat. Dan mengenai pembagian waktu kerja, diharuskan menjalankan tugas saya dengan baik sebagai Kepala Kampung ataukah tugas yang terkait dengan ADD. Kedua Hal ini diperlakukan secara adil, misalnya setiap hari jam 9.00 pagi sampai jam 12.00 siang harus berada di kantor melayani kerja rutinitas melayani masyarakat dan menandatangani surat-surat masuk dan surat keluar, menerima pengaduan masyarakat atau hal-hal lainnya. Setelah pekerjaan kantor selesai barulah dilanjutkan turun ke lapangan untuk mengecek setiap kegiatan pembangunan yang bersumber dari ADD yang sudah diserahkan kepada setiap kelompok-kelompok kerja. Hal ini dilakukan agar supaya

semua program kampung Waryesi berjalan dengan baik.

Informasi yang dikemukakan oleh Kepala Kampung Waryei, dipertegas kembali oleh informan 2 (Sekretaris), yang mengatakan bahwa tanggungjawab telah diperlihatkan oleh Kepala Kampung Waryei, karena dengan adanya program ADD Kepala kampung sangat memperhatikannya dengan mengikuti semua kegiatan terkait dengan anggaran ADD tersebut. Dan terkait dengan tanggungjawabnya, Kepala Kampung dapat membagi tugasnya yang pokok dengan tugas tambahan pada program ADD.

Terkait kejelasan tugas yang diberikan oleh Kepala Distrik ataukah dari Bupati, dapat dikatakan (menurut informan 2, sekretaris Kepala Kampung) bahwa tugas dijalankan secara terstruktur dari atas (tugas itu dari Bapak Bupati turun ke Distrik dan turun ke Kepala Kampung). Apa yang dikemukakan oleh informan 2 (sekretaris Kepala Kampung), dipertegas oleh informan 4 (Kepala urusan pembangunan), yang mengatakan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan sudah terstruktur dari atas, yaitu dari Bapak Bupati, turun kebawah secara berjenjang sampai kepada pekerjaan yang dilakukan di Kampung ini.

2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD di Kampung Waryei

Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat sehubungan dengan program ADD, penulis mewawancarai informan 1 (Kepala Kampung) Waryei, dan menurut Kepala Kampung Waryei bahwa Kepala

Kampung senang jika masyarakat turut berpartisipasi terkait dengan program ADD, partisipasi masyarakat inilah bentuk kontribusi masyarakat dalam program pemerintah yang ada di Kampung Waryei.

Lebih lanjut Informan 1 (Kepala Kampung) mengatakan bahwa semua masyarakat dilibatkan dalam musyawarah kampung. Masyarakat yang dimaksud yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat biasa. Dan inilah salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Dan dari keaktifan semua unsur masyarakat dalam pembangunan kampung, sehingga dapat dikatakan bahwa antusiasme masyarakat dalam bentuk partisipasi sangat tinggi.

Hal yang dikemukakan oleh Kepala Kampung Waryei, didukung oleh informan 5 (kaur kesra), yang mengatakan bahwa Kepala Kampung sering mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi atau berkontribusi dalam program-program pembangunan kampung waryei, misalnya dilibatkan dalam musyawarah kampung, dilibatkan dalam semua kegiatan-kegiatan pembangunan kampung, sehingga wajar jika tingkat partisipasi masyarakat sangatlah tinggi.

Untuk mengkonfirmasi yang dikemukakan oleh Kepala Kampung dan tokoh masyarakat tentang kontribusi dan partisipasi masyarakat dalam program terkait ADD, penulis mewawancarai informan dari unsur masyarakat secara langsung, dan menurut masyarakat bahwa Kepala kampung Waryei, adalah sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakatnya, dan jika ditanyakan

tentang kontribusi dan partisipasi masyarakat, dapat saya katakan Kepala Kampung sering mengajak masyarakat untuk berkontribusi dan berpartisipasi secara langsung dalam pembangunan pedesaan yang dibiayai ADD, dan hal ini disampaikan biasanya dalam pertemuan-pertemuan dengan masyarakatnya. Sehingga Tepatlah kalau dikatakan bahwa di Kampung Waryei tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi, karena Kepala Kampung memang peduli pada pembangunan di Kampung yang dipimpinnya.

Selain tentang kontribusi masyarakat terkait program ADD, penulis juga menanyakan Kepada Kepala Kampung Waryei tentang pengorganisasian (turut menetapkan dan mengatur) program ADD, informan 1 (kepala kampung) menjelaskan bahwa program ADD merupakan tanggung jawab Kepala Kampung dan jika ditanya mengenai pengorganisasian (masyarakat turut menetapkan dan mengatur program ADD) tidak terlibat sejauh itu.

Apa yang dikemukakan oleh kepala kampung, senada dengan yang diungkapkan oleh informan lainnya (tokoh masyarakat), yang mengatakan bahwa masyarakat itu tidak perlu terlalu jauh ikut mencampuri urusan Kepala Kampung untuk menetapkan dan terlalu jauh mengatur program ADD, karena itu kewenangannya Kepala Kampung Waryei. Masyarakat itu punya batas-batas tertentu untuk terlibat dalam pembangunan pedesaan.

Begitu pula tentang peranan/aksi masyarakat dalam program ADD, menurut informan 1 (Kepala Kampung) Waryei, mengatakan bahwa

peranan/aksi masyarakat terkait dengan program ADD sebatas memberikan saran tentang pelaksanaan program ADD. Sebagai Kepala Kampung, jika saran masyarakat itu baik, maka akan diterima. Namun jika saran itu tidak masuk akal dan bertolak belakang dengan tujuan program ADD, saya pasti usulan tersebut ditolak. Tetapi pihaknya tetap memberikan motivasi kepada masyarakat untuk tetap terlibat di Kampung Waryei.

Pernyataan Kepala Kampung, didukung oleh informan dari unsur tokoh masyarakat, yang mengatakan bahwa peran masyarakat hanya sebatas memberikan masukan/saran kepada Kepala Kampung. Saran dari masyarakat itupun tidak langsung diterima oleh Kepala Kampung, tetapi ditampung saja dan dipertimbangkan oleh Kepala Kampung.

Untuk mengkonfirmasi yang dikemukakan oleh Kepala Kampung dan tokoh masyarakat tentang peran masyarakat dalam program terkait ADD, dilakukan wawancara pada Informan dari unsur masyarakat secara langsung. Menurut masyarakat yang menyadari bahwa mereka punya batas-batas untuk berperan dalam program pedesaan. Masyarakat berperan paling cuma sebatas memberikan saran dan mengajukan pendapat.

Pembahasan Penelitian

Terkait proses Pengelolaan Alokasi Dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Kampung Waryei distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori, Pemerintah Kampung Waryei terlebih dahulu menyusun tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang terdiri dari Kepala Desa

selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa Selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Kesra Selaku Bendahara Desa dan di bantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Selanjutnya, proses pengelolaan alokasi dana desa terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Kampung Waryei merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi, hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Kampung Waryei agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

Kepala Kampung adalah penanggungjawab dari pengelolaan keuangan kampung secara keseluruhan. Dalam PP No. 43 tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala kampung. Kepala kampung wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APB kampung kepada Distrik setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala kampung wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB kampung kepada Distrik setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat Kepala kampung ditujukan kepada Distrik yang disampaikan melalui Distrik. Pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APB kampung tercantum dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan kampung. Dalam Permendagri

tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala kampung.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan salah satu persyaratan utama untuk keberhasilan proses pembangunan di pedesaan, namun adanya hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan dalam usaha melaksanakan proses pembangunan yang partisipatif karena pihak perencana dan pelaksana pembangunan (dalam hal ini pemerintah) belum memahami makna sebenarnya dari konsep partisipasi. Dalam partisipasi setiap anggota masyarakat dituntut suatu kontribusi atau sumbangasinya. Kontribusi tersebut bukan hanya terbatas pada dana dan finansial saja tetapi dapat berbentuk daya (tenaga) dan ide (pemikiran).

Terkait dengan yang dikemukakan oleh informan, baik ungkapan Kepala Kampung, Tokoh masyarakat, dan masyarakat Kampung Waryei, jelaslah bahwa Peranan kepala desa akan sangat penting apabila mereka aktif untuk mendatangi dan mengajak masyarakat, sering menghadiri pertemuan-pertemuan, dan dalam setiap kesempatan selalu menjelaskan manfaat program pemerintah desa. Para pimpinan masyarakat ini aktif pula dalam mengajak warga masyarakat untuk mengelola kegiatan pemerintah desa. Apabila masyarakat melihat bahwa tokoh mereka yang disegani ikut serta dalam kegiatan tersebut, maka masyarakat pun akan tertarik untuk ikut serta. Dengan demikian jelaslah bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD sangatlah tinggi, walaupun sebatas partisipasi dalam memberikan saran.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kampung Waryei Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori telah dilakukan secara efektif dan efisien oleh Kepala Kampung.
2. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan ADD adalah memberikan saran kepada Kepala Kampung.

Oleh karena itu disarankan dua hal berikut untuk meningkatkan efisiensi kinerja pengelolaan ADD:

1. Untuk mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program Anggaran Dana Desa, sebaiknya Kepala Kampung Waryei dapat lebih meningkatkan perannya, baik pada tugas pokok sebagai kepala Kampung, maupun tugas terkait dengan program Anggaran Dana Desa.
2. Disarankan agar Kepala Kampung dapat mensosialisasikan lebih awal program Anggaran Dana Desa kepada masyarakat secara keseluruhan, agar masyarakat dapat memahami lebih awal maksud dan tujuan program ADD.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, K & Jessica, K (2000). *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*. Edisi I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ahmadi, Ruslam. 2005. *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Arimbi. (1993). *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: WALHI.
- Bhattacharyya, J. 1972. *Administrative Organisation*. Brusel: HAS

- Bintarto, R. Dr.1983. *Interaksi Desa-Kota*.Yogyakarta: Ghalia Indonesia
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Prenada Meda Group, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Conyers, Diana. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haris, Dian Rasdiyanah, 2015. *Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari*. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Halu Oleo.
- Hafifah SJ Sumarto, 2003, *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Handayani, Suci. 2006. *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama)*. Surakarta: Kompip Solo
- Isbandi, Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip UI press.
- Jayadinata, T. Johara. 2000. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*. Bandung: Penerbit ITB.
- Kartasmita, Ginandjar, 2001. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta: Pustaka CIDESINDO.
- Mardiasmo, 2006. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Andi.

- Mardiasmo. 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Mubyarto. 1997. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. LP3ES. Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu, 1984, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Nelson, Bryant dan White. 1982. *Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang (Edisi Terjemahan)*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Notoatmojo, S (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rhineka.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Airlangga
- Slamet, M. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press.
- Supriady, Deddy dan Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: SUN.
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isi Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang. UM Press
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jabbara, Joseph G and Dwivedi, O.P. 1989. “Public Service Accountability.” *Typeset by The Type Galley, Boulder, Colorado*: Kumarian Press, Inc.
- Juliantara, Dadang, 2002, *Pembaruan Desa, Bertumpu pada yang Terbawah*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta
- Patton, C.V. and D. Savicky. 1993. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. (Second Edition). Upper Saddle River. Prantice Hall.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yarsif Watanpone.
- Siagian, Sondang. P.2005. *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Suparno, A. Suhaenah. 2001. *Pembangunan Desa*. Jakarta Erlangga.
- Todaro. Michael p. 1979. *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*, terjemahan
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3S. Jakarta.
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*. Semarang: Ciyapps Diponegoro Universiti.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Pelaksanaan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja, HAW. (2003). *Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah daerah*.
_____, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
-----, 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

